

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Gorontalo



KETUA BPK RI MENYERAHKAN LHP LKPD TA 2020 PROVINSI GORONTALO

Gorontalo, 11 Juni 2021

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Jalan *Bypass*, Botu, Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, Pukul 16.00 WITA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dihadiri oleh Ketua BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFRA., Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA., CSFA., Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, DR. Drs. Paris R.A. Jusuf, Pejabat Instansi Vertikal, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Kegiatan penyerahan LHP LKPD Provinsi Gorontalo TA 2020 merupakan acara bersejarah karena Ketua BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE berkenan menyerahkan secara langsung LHP LKPD Provinsi Gorontalo TA 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, DR. Drs. Paris. R. A. Jusuf, S.Sos.I., M.Si., dan Gubernur Gorontalo, Drs. Rusli Habibi, M.A.P dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan sidang rapat berjalan dengan khidmat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan atas Covid-19. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Gorontalo TA 2020.

Namun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan permasalahan pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta permasalahan dalam pembangunan manusia dan penyediaan Mahyani pada provinsi Gorontalo yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Permasalahan pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dimaksud diantaranya:

Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Negeri tidak menyampaikan pertanggungjawaban Belanja Barang senyatanya sebesar Rp996.414.714,00.

Kedua, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang dan Jasa untuk Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin/Berprestasi tidak sesuai ketentuan.

Ketiga, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie (RSHAH) belum memadai melaksanakan pengelolaan persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

Keempat, Pemerintah Provinsi Gorontalo belum tertib menatausahakan Aset Tetap. Hal ini diantaranya ditandai dengan terdapat kelemahan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

Permasalahan dalam pembangunan manusia dan penyediaan Mahyani yang dimaksud diantaranya:

Pertama, Pemerintah Provinsi Gorontalo belum membuat rancangan program dan kegiatan yang mendukung pemanfaatan dan kemanfaatan.

Kedua, Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak menyediakan suprastuktur program dan kegiatan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan kemanfaatan hasil program.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak mengoptimalkan keunggulan sumber daya dan potensi masyarakat yang dimiliki untuk menentukan alternative pengawasan, monitoring dan evaluasi yang efektif di tengah dinamika pengelolaan keuangan daerah.

Keempat, Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dapat merubah pola pikir aparatur untuk lebih melayani dan lebih berorientasi pada manfaat program dan kegiatan.

Kelima, Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dapat merubah pola pikir masyarakat penerima bantuan untuk keluar dari ketergantungan pada intervensi pemerintah.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan. (htu/gto)

Subbagian Humas dan TU Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Email: perwakilan.gorontalo@bpk.go.id